

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
DAYA SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DI WILAYAH PEMBAYARAN KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
JEMBER**

***THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE ABILITY OF
STATE EXPENSES INCOME BUDGET ABSORBENT AT KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) IN JEMBER***

MAGISTER ILMU EKONOMI

**OLEH:
MOHAMAD MAS'UD, SE
NIM: 060820201012**

**PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER, JULI 2008**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
DAYA SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DI WILAYAH PEMBAYARAN KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
JEMBER**

***THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE ABILITY OF
STATE EXPENSES INCOME BUDGET ABSORBENT AT KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) IN JEMBER***

**TESIS DISERAHKAN KEPADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER UNTUK MEMENUHI
SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR**

MAGISTER ILMU EKONOMI

OLEH:

**MOHAMAD MAS'UD, SE
NIM: 060820201012**

Pembimbing Tesis:

**Prof. Dr. H. Harijono, SU. Ec, Pembimbing Utama
Drs. H. Sony Sumarsono, MM, Pembimbing Anggota**

**PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER, JULI 2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal: 5 Juli 2008

Oleh
Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Harijono, SU. Ec
NIP.130 350 765

Dosen Pembimbing Anggota,

Drs. H. Sony Sumarsono, MM
NIP. 131 750 836

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana
Universitas Jember

Dr. Rafael Purtomo S. SE, M. Si
NIP. 131 793 384

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
DAYA SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DI WILAYAH PEMBAYARAN KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
JEMBER**

***THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE ABILITY OF STATE
EXPENSES INCOME BUDGET ABSORBENT AT KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) IN JEMBER***

Kami menyatakan bahwa kami telah membaca tesis yang dipersiapkan oleh Mohamad Mas'ud, SE ini, dan bahwa dalam pendapat kami, cukup memuaskan dalam cakupan dan kualitas suatu tesis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi dalam Bidang Keuangan Daerah

Telah dipertahankan di depan Tim Pembimbing/ Penguji pada tanggal:
5 Juli 2008

Susunan Tim Pembimbing/ Penguji

Ketua,

Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes
NIP. 131 624 478

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. H. Harijono, SU. Ec
NIP.130 350 765

Drs. H. Sony Sumarsono, MM
NIP. 131 750 836

Mengetahui/ Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Rafael Purtomo S. SE, M. Si
NIP. 131 793 384

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
NIP. 131 793 384

MOTTO

***“GOD WILL NOT CHANGE YOUR FATE UNLESS
YOU ENDEAVOUR TO CHANGE IT”
(HOLY QUR’AN : AR-RAD; 11)***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan oleh karena itu penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan, dorongan serta fasilitas sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Harijono, SU. Ec., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Sony Sumarsono, MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah telah banyak memberikan bimbingannya sampai penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. A. Khusairy, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana beserta jajarannya (Wadir I, Wadir II, dan Wadir III, Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Dosen dan para staf administrasi) yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini selesai.
3. Bapak Kepala KPPN Jember yang telah memberikan ijin studi kepada penulis untuk meneliti di lingkungan KPPN Jember.
4. Khusus kepada istri dan anak-anakku, serta keluarga besar Bpk. Asim (Alm) dan Keluarga besar Bpk. Drs. H. Astaniman atas doa, dorongan motivasi, dukungan dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Jember, Juli 2008

Penulis.

RINGKASAN

Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Daya Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember” mempunyai tujuan untuk mengetahui (1) pengaruh secara simultan dan parsial dari faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember dan (2) pengaruh yang paling dominan dari faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan (pejabat perbendaharaan) satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jember yang berjumlah 320 orang. Sampel dalam penelitian ini di tentukan sejumlah 48 orang (15%) dari jumlah populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan prosedur *purposive sampling*. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh secara simultan dan parsial dari faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) dengan kemampuan daya serapan APBN (Y) digunakan alat analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari hasil perhitungan uji F menunjukkan Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X_1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X_2), Perubahan DIPA (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Kemampuan Daya Serapan APBN dengan nilai F hitung sebesar 7,691 dengan tingkat signifikansi dibawah 1%. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X_1) berpengaruh sangat nyata dan dominan terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN. Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X_2) dan Perubahan DIPA (X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kemampuan daya Serapan APBN.

Kata kunci: *Pemahaman mekanisme pelaksanaan anggaran, Penerbitan SK pejabat pengelola keuangan, Perubahan DIPA dan Kemampuan daya serapan APBN*

ABSTRACT

The research entitled “*The Analysis of Factors influence the ability of State Expenses Income Budget Absorbent at Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) in Jember*” has aim to know (1) the influence simultaneously and partially of understanding factor on mechanism of budget execution, publication of decree of monetary organizer functionary and change DIPA on the ability of absorbent energy APBN at payment region KPPN Jember and (2) the most dominant of understanding on mechanism of budget execution, publication of decree of monetary organizer functionary and DIPA changing on the ability of absorbent power APBN at payment region KPPN Jember

The population in this research is the entire monetary organizer (exchequer functionary) unit of work at payment region KPPN Jember with 320 respondents. Sample in this research are decided by 48 respondents (15%) from the total number of population. The method of taking the sample is by using *purposive sampling* procedure. Hypothesis used in this research is that there is an influence simultaneously and partial of understanding factor on mechanism of budget execution, publication of decree of monetary organizer functionary and change DIPA on the ability of absorbent energy APBN at payment region KPPN Jember. Analysis tool used to know the influence mechanism of budget execution (X_1) with the ability of absorbent power APBN (Y) use doubled linear appliance regrestion.

The result of the research conclude that from the calculation F test show mechanism of budget execution (X_1), publication of decree of monetary organizer functionary (X_2) and change DIPA (X_3) influence simultaneously on the dependent variable or absorbent power APBN with F value 7,691 with the level of significance below 1%. Based on the result of calculation by using t-test, it can be concluded that understanding factor on mechanism of budget execution (X_1) has a great and dominant effect on the ability of absorbent power APBN. Publication SK monetary organizer functionary (X_2) and DIPA changing partially does not affect on the ability of absorbent power APBN.

Keywords: *Understanding factor on mechanism of budget execution, Publication of decree of monetary organizer functionary, DIPA changing and The ability of absorbent power APBN*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	9
2.2. Penelitian Pendahuluan	34
2.3. Kerangka Konseptual	37
2.4. Hipotesis	38
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	39
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	41
3.4. Metode Pengumpulan Data	42
3.5. Identifikasi Variabel	42
3.6. Definisi Operasional Variabel	43
3.7. Tehnik Pengukuran Data	44
3.8. Metode Analisis Data.....	45
3.9. Kerangka Pemecahan Masalah	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	57
4.2. Pembahasan	71

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Perbandingan Realisasi Dana Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2006 dan 2007.....	4
1.2.	Perbandingan Realisasi Dana Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Jember Tahun Anggaran 2006 dan 2007.....	5
2.1.	Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya	35
3.1.	Populasi Penelitian (Pejabat Pengelola Keuangan di Wilayah Pembayaran KPPN Jember)	40
3.2.	Sampel Penelitian dengan Menggunakan Teknik <i>Purposive</i> Sampling	41
4.1.	Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan	57
4.2.	Jumlah Responden Berdasarkan Diklat yang Telah Diikuti	58
4.3.	Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan Terakhir..	59
4.4.	Jumlah Responden Berdasarkan Kewenangan	60
4.5.	Uji Validitas	61
4.6.	Reliabilitas	62
4.7.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
4.8	Hasil Uji-F	65
4.9.	Hasil Uji-t	65
4.10.	Hasil Uji Multikolinearitas	68

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1.	Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Negara	25
2.2.	Pendelegasian Kewenangan dan Pelaksanaan	27
2.3.	Pelaksanaan Anggaran	29
2.4.	Mekanisme Pembayaran	30
2.5.	Pengujian Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Negara.....	30
2.6.	Kerangka Konseptual	37
3.1.	Kerangka Pemecahan Masalah	54
4.1.	Uji Grafis <i>Scotter Plot</i>	70
4.2.	Hasil Pengolahan Uji <i>Glejser</i>	70

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Penyampaian Daftar Pertanyaan	83
2	Daftar Pertanyaan	84
3	Data Hasil Kuisioner (Data Lapangan).....	87
4	Data Hasil Olahan MSI.....	89
5	Uji Validitas	90
6	Uji Reliabilitas	92
7	Hasil Regresi.....	96

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan aturan manajemen keuangan pemerintah. Undang-undang tersebut memuat perubahan manajemen keuangan pemerintah yang berbasis input ke arah manajemen keuangan berbasis output yang disebut manajemen keuangan berbasis kinerja (*performance based management*). Perubahan konsep manajemen keuangan tersebut meliputi perubahan di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Untuk melaksanakan sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang mempertanggungjawabkan keuangan dan capaian kinerja, maka harus disinkronkan muatan-muatan yang terkandung dalam sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang mencakup program dan kegiatan, keluaran dan hasil, dan klasifikasi anggaran.

Penganggaran terpadu (*unfied budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penerapan penganggaran secara terpadu mulai dilaksanakan pada APBN tahun anggaran 2005 dengan mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (Depkeu, 2007: 20)

Dokumen DIPA memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga, dengan maksud penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja ini dapat mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah.

Pelaksanaan APBN dengan penganggaran terpadu dimulai dengan diterbitkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA pada awal tahun 2005. Setelah masa transisi pada TA 2005, maka mulai TA 2006, DIPA telah dapat serentak dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran kementerian/lembaga pada awal tahun anggaran dimulai, tepatnya tanggal 2 Januari tahun bersangkutan dengan tujuan pencairan dana dalam DIPA dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan rencana penarikan untuk setiap program/kegiatan yang ada dalam DIPA.

Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2007 telah dimulai dengan diserahkannya DIPA kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 2 Januari 2007. Dengan DIPA diterima lebih awal, diharapkan pencairan dana dalam DIPA lebih cepat dilakukan. Namun evaluasi penyerapan dana Semester I tahun 2007 menunjukkan penyerapan anggaran kementerian/lembaga masih rendah, rata-rata hanya sebesar 24 persen. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bila dilihat dari perspektif tentang efektifitas sistem baru pengelolaan keuangan negara.

Dengan melihat pengalaman terhadap penyerapan dana tahun 2006, ternyata kecenderungan yang sama juga terjadi pada Semester I tahun 2007.

Namun demikian data memperlihatkan bahwa pada bulan September-Oktober 2006, pencairan dana APBN mengalami peningkatan yang signifikan. Penyerapan dana kementerian negara/lembaga mencapai 80 persen. Bahkan penyerapan dana dapat mencapai 97 persen pada akhir tahun anggaran 2006. Kondisi penyerapan dana APBN yang cenderung terakumulasi pada akhir tahun anggaran menunjukkan kurangnya efektifitas pemanfaatan dana APBN. (Treasury, 2007: 35)

Menurut Choirel (Treasury, 2007:36) penyerapan dana APBN sepanjang tahun 2006 dan 2007 ternyata tidak proposional terhadap pagu dana dalam DIPA.

Penyerapan rendah pada awal tahun hingga Semester I tahun 2006 dan 2007 menjadi kecenderungan umum. Namun demikian ternyata masing-masing jenis belanja memiliki kecenderungan masing-masing. Penyerapan dana DIPA tertinggi pada Semester I tahun 2006 terjadi pada Belanja Pegawai (30,18%), kemudian diikuti Belanja Bantuan Barang (27,11%), Belanja Sosial (25,72%), Belanja Modal (15,03%) dan rata-rata penyerapan dana (23,09%). Pada tahun 2007 penyerapan tertinggi masih terdapat pada Belanja Pegawai (42,14%).

Sementara serapan pada Belanja Sosial (28,91%), Belanja Barang (20,50%) dan Belanja Modal (16,39%) dan rata-rata penyerapan per jenis belanja (26,26%).

Pola pencairan dana Semester I tahun 2006 dan 2007 relatif sama, hal tersebut dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Dana Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2006 dan 2007

JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN I		REALISASI SEMESTER I	
	2006	2007	2006	2007
BELANJA PEGAWAI	11.51%	17.60%	30.18%	42.14%
BELANJA BARANG	5.12%	5.80%	27.11%	20.50%
BELANJA MODAL	1.58%	3.49%	15.03%	16.39%
BELANJA SOSIAL	10.11%	8.55%	25.72%	28.91%
RATA-RATA	6.79%	8.60%	23.09%	26.26%

Sumber: Dit. PA, 2007 (data diolah)

Data menunjukkan bahwa penyerapan dana DIPA pada Triwulan I tahun 2006 dan 2007 rata-rata kurang 10%. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa penyelesaian DIPA yang tepat waktu pada awal Januari 2006 dan 2007 belum berpengaruh pada efektivitas pencairan dana. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran belum dapat segera menggunakan anggaran dalam DIPA untuk membiayai aktivitas kementerian negara/ lembaga di lingkungannya, bahkan sepanjang Semester I tahun 2006 dan 2007 (karena sepanjang Semester I penyerapan dana tidak mencapai 30%). Kondisi penyerapan dana APBN pada Semester I tahun 2006 dan 2007 menegaskan permasalahan yang timbul dalam hubungannya dengan pelaksanaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah yang menunjukkan penyerapan dana sepanjang tahun anggaran tidak proposional sesuai pagu dana yang tersedia.

Pada tingkat daerah, khususnya di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yang mencakup Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang tahun 2006 semester I dan tahun 2007 semester I mengalami kondisi yang sama terhadap penyerapan dana APBN secara nasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) KPPN Jember tahun 2006 dan 2007, data menunjukkan penyerapan dana APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember rata-rata penyerapan per jenis belanja sebesar 6.85% pada Triwulan I tahun 2006 dan sebesar 9.88% pada triwulan I tahun 2007, sedangkan pada semester I tahun 2006 sebesar 26.65% dan semester I tahun 2007 sebesar 25.43% (rata-rata penyerapan dana semester I masih dibawah 50%). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Dana Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Jember Tahun Anggaran 2006 dan 2007

JENIS BELANJA	REALISASI TRIWULAN I		REALISASI SEMESTER I	
	2006	2007	2006	2007
BELANJA PEGAWAI	17.45%	21.03%	43.13%	47.37%
BELANJA BARANG	5.89%	11.52%	29.57%	28.29%
BELANJA MODAL	3.25%	6.92%	22.78%	20.87%
BELANJA SOSIAL	0.80%	0.04%	11.12%	5.18%
RATA-RATA	6.85%	9.88%	26.65%	25.43%

Sumber: KPPN Jember, 2007 (data diolah)

Penyerapan dana DIPA pada Triwulan I tahun 2007 masih relatif rendah di mana Belanja Pegawai (30,18%), Belanja Barang (27,11%), Belanja Sosial (25,72%), Belanja Modal (15,03%). Sedangkan pada Semester I Belanja Belanja Pegawai (47,37%), Belanja Barang (28,29%), Belanja Modal (20,87%) dan Belanja Sosial (5,18%). Rata-rata penyerapan dana pada Semester I tahun 2006 dan 2007 kurang dari 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan dana DIPA di Wilayah pembayaran KPPN Jember merupakan cermin dari kondisi penyerapan dana APBN secara nasional.

Berdasarkan data penyerapan dana APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember dan pengamatan awal di lapangan terhadap para pengelola keuangan satker-satker di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember khususnya untuk Belanja Pemerintah Pusat. Menurut Choiroel (Treasury; 1997:37) faktor-faktor yang mempengaruhi daya serapan APBN diantaranya: (1) pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran; (2) penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan; (3) perubahan DIPA.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah yang dikemukakan adalah:

1. Apakah faktor-faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember ?
2. Apakah faktor-faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA secara parsial berpengaruh terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember ?
3. Diantara faktor-faktor tersebut pada butir 2 diatas, manakah yang berpengaruh dominan terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan faktor-faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial faktor-faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang dominan dari factor-faktor tersebut pada butir 2 terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi:

1. Pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan dalam menentukan kebijakan Perbendaharaan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN.

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember dalam upaya peningkatan pelayanan dan pembinaan perbendaharaan terhadap satuan kerja-satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jember
3. Satuan kerja-satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jember dalam hal pelaksanaan anggaran mulai dari proses penyusunan DIPA sampai dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penganggaran

Menurut Mardiasmo (2002: 181) penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan *managerial plan of action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Tahapan penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peran penting dilihat aspek-aspek (Mardiasmo, 2002: 182) sebagai berikut: (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber

daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

Anggaran mempunyai peran penting dalam sistem keuangan Pemerintah. Peran tersebut dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya sebagai berikut: (1)

anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, (2) anggaran sebagai alat kebijakn fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi; (3) anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap tersebut, anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legeslatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu; (4) anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemerintah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran sehingga mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi dan; (5) anggaran sebagai alat evaluasi kinerja, di mana anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen pemerintah kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan kinerja pemerintah akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan. (Mardiasmo, 2002: 183-184).

A. Pengertian Anggaran

Kata anggaran merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris *budget* yang sebenarnya berasal dari bahasa Perancis *bougette*. Kata ini mempunyai arti sebuah tas kecil. Berdasar dari arti kata asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, baik dana, SDM maupun sumber daya lainnya. Karena terbatasnya dana misalnya, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa pengertian anggaran yang dapat dikutip, (Depkeu, 2007: 7)

Anggaran negara (*state budget*) menurut John F. Due dalam "Government Finance and Economic Analysis" adalah: "A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a spesific period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed expenditures and expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditures and revenues for current and past period."

Menurut Wildavsky, anggaran adalah:

- a. catatan masa lalu;
- b. rencana masa depan;
- c. mekanisme pengalokasian sumber daya;
- d. metode untuk pertumbuhan;
- e. alat penyaluran pendapatan;
- f. mekanisme untuk negosiasi;

- g. harapan-aspirasi-strategi organisasi;
- h. satu bentuk kekuatan kontrol;
- i. alat atau jaringan komunikasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, anggaran negara meliputi:

- a. rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
- b. gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan;
- c. alat pengendalian;
- d. instrumen politik; dan
- e. disusun dalam periode tertentu.

Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut UU 17/2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Depkeu, 2007: 8)

B. Prinsip-Prinsip Penganggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. (Depkeu, 2007:9)

Secara umum, prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut:
(Depkeu, 2007: 9)

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBN harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedia penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan program dan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam

pemberian pelayanan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang digunakan dalam anggaran berupa pendapatan negara pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta seluruh anggota masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBN disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (keluaran dan hasil) dari perencanaan atas alokasi biaya atau masukan/input yang telah ditetapkan. Hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau masukan. Selain itu juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap unit kerja yang terkait.

C. Siklus Anggaran

Menurut Madiasmu (2002: 211) prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya, siklus anggaran terdiri atas empat tahap, yaitu

1. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran, pada tahap dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia secara akurat.
2. Tahap ratifikasi anggaran, tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat antara pihak eksekutif dan legislatif.

3. Tahap pelaksanaan anggaran, dalam tahap ini hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan public adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan system pengendalian manajemen.
4. Tahap pelaporan dan Evaluasi anggaran, merupakan tahap terakhir yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintahan.

2.2.2. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja dalam bentuk program-program yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. (Depkeu, 2007,10)

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: (Depkeu, 2007,10)

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya;
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemograman, penganggaran dan evaluasi. Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu: (Depkeu, 2007: 11)

- a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi
- b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus
- c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang)
- d. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas
- e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk

mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Selanjutnya untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut: (Depkeu, 2007: 11)

1. Masukan (*Input*)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan. Tolok ukur ini dapat juga digunakan untuk perbandingan (*benchmarking*) dengan lembaga-lembaga lain yang relevan. Beberapa hal berikut ini sering dijumpai dalam menetapkan tolok ukur masukan yang dapat menyempatkan:

- a. Pengukuran Sumber Daya Manusia tidak menggambarkan intensitas keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengukuran biaya tidak akurat karena banyak biaya-biaya yang dibebankan ke suatu kegiatan tidak mempunyai kaitan yang kuat dengan pencapaian sasaran kegiatan tersebut.

- c. Banyaknya biaya-biaya masukan (input) seperti gaji bulanan personalia pelaksana, biaya pendidikan dan pelatihan, dan biaya penggunaan peralatan dan mesin seringkali tidak diperhitungkan sebagai biaya kegiatan.

2. Keluaran (*output*)

Keluaran adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Dengan membandingkan indikator keluaran instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Dalam mempergunakan indikator keluaran, beberapa permasalahan berikut perlu dipertimbangkan:

- a. Perhitungan keluaran seringkali cenderung belum menentukan kualitas.

Sebagai contoh jumlah layanan medik di RSUD mungkin belum memperhitungkan kualitas layanan yang diberikan.

- b. Indikator keluaran sering kali tidak dapat menggambarkan semua keluaran kegiatan, terutama yang bersifat intangible. Sebagai contoh, banyak hasil penelitian yang walaupun mengandung penemuan yang baru, namun karena berbagai pertimbangan tertentu tidak dapat dipatenkan.

3. Hasil (*outcome*)

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolok ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pencapaian indikator kinerja *outcome* ini belum tentu akan dapat terlihat dalam jangka waktu satu tahun. Seringkali *outcome* baru terlihat setelah melewati kurun waktu lebih dari satu tahun, mengingat sifatnya yang bukan hanya sekedar hasil. Dan mungkin juga indikator *outcome* tidak dapat dinyatakan dalam ukuran kuantitatif akan tetapi lebih bersifat kualitatif.

B. Target Kinerja

Setelah indikator kinerja ditentukan, mulailah disusun target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja adalah tingkat kinerja yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu tahun anggaran tertentu dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan. Target kinerja harus mempertimbangkan sumber daya yang ada dan juga kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan target kinerja yang baik, seperti dapat dicapai, ekonomis, dapat diterapkan, konsisten, menyeluruh, dapat dimengerti, dapat diukur, stabil, dapat diadaptasi, legitimasi, seimbang, dan fokus kepada pelanggan.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan target kinerja: (Depkeu, 2007: 15)

- a. Memiliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahan
- b. Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu kegiatan tertentu.
- c. Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja.
- d. Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, SDM, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya.
- e. Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan.

Penetapan target kinerja kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Depkeu, 2007: 15)

- a. Spesifik
Berarti unik, menggambarkan obyek/subyek tertentu, tidak berdwimakna atau diinterpretasikan lain
- b. Dapat diukur
Secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
- c. Dapat Dicapai (*Attainable*)
Sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan pada kondisi yang diharapkan akan dihadapi
- d. Realistis;

- e. Kerangka waktu pencapaian (*time frame*) jelas; dan
- f. Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai.

2.2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu dokumen yang sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Undang-Undang APBN mencerminkan otorisasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam batas-batas anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan merupakan estimasi penerimaan (*estimated revenue*) yang diperkirakan akan diterima dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran belanja merupakan pagu anggaran belanja yang disediakan untuk membiayai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran (*appropriation*), yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Undang-undang APBN inilah yang mengatur program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dalam suatu tahun anggaran. (Depkeu, 2007: 20)

Selanjutnya Undang-Undang APBN dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, yang dalam istilah keuangan Negara dikenal sebagai *apportionment*. Peraturan Presiden dimaksud diperlukan sebagai landasan operasional bagi Pemerintah untuk melaksanakan APBN.

Periode pelaksanaan APBN adalah satu tahun, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat dilaksanakan secara tepat waktu maka dalam Undang-Undang 17/2003 maupun PP 21/2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah diundangkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya demikian diperlukan agar Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran. Demikian pula bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dengan ditetapkannya APBN pada bulan Oktober, mereka dapat menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat waktu.

2.2.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut Estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di Pemerintah Pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di Pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan Negara adalah beralihnya konsep administrasi keuangan (*financial administration*) ke manajemen keuangan (*financial management*). Hal ini memerlukan pembaharuan pada setiap fungsi manajemen, baik pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan. Semua fungsi diarahkan

pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Depkeu, 2007: 21)

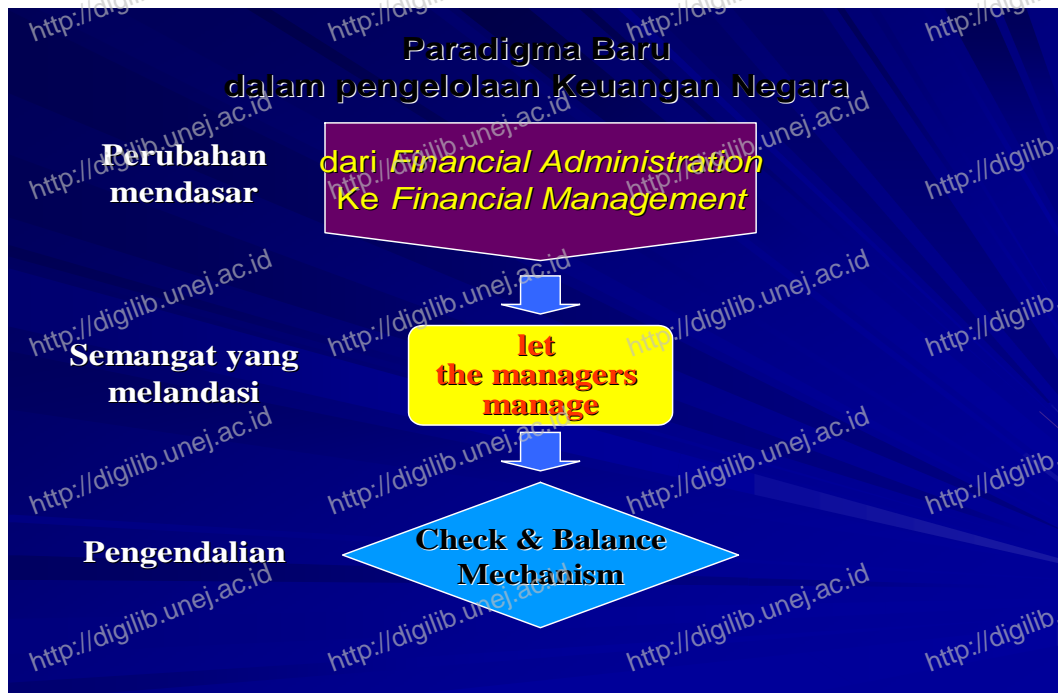
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam reformasi manajemen keuangan Negara adalah "*let the managers manage*". Dengan pendekatan ini kepada pengguna anggaran diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan anggaran. Pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk menyusun DIPA sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta plafon anggaran yang telah disediakan. Dengan mekanisme yang demikian maka kepada para pengguna anggaran diberikan fleksibilitas yang seluas-luasnya untuk mengatur anggarannya, dituangkan dalam DIPA sesuai dengan kebutuhan. (Depkeu, 2007: 21)

Namun demikian mekanisme *check and balance* tetap dilaksanakan sehingga DIPA yang disusun oleh pengguna anggaran tidak serta merta langsung diberlakukan, namun harus dibahas dulu dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperoleh pengesahan. Pembahasan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengendalian, dilakukan untuk meyakini bahwa DIPA disusun sesuai dengan Undang-Undang APBN serta menggunakan standar harga yang wajar sesuai dengan ketentuan.

Anggaran dalam DIPA diklasifikasikan terinci sampai organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dengan demikian maka azas spesialisasi benar-benar digunakan di sini, yaitu anggaran secara spesifik disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan tidak dapat digeser tanpa mekanisme revisi DIPA sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan diberlakukannya manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan Negara maka setiap pengguna anggaran wajib menyusun rencana penarikan dana untuk setiap program/kegiatan yang ada dalam DIPA. Hal yang sama berlaku untuk penerimaan, yaitu rencana penerimaan pendapatan juga disiapkan jika pengguna anggaran tersebut mempunyai alokasi anggaran pendapatan. Informasi tentang rencana penarikan dana serta rencana penerimaan ini diperlukan oleh Bendahara Umum Negara untuk menyusun anggaran kas.

Suatu hal yang perlu diingat dalam anggaran adalah digunakannya pendekatan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja mengamanatkan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Yang dimaksud dengan prestasi kerja adalah *output* atau *outcome* yang dihasilkan atau akan dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dengan demikian maka dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu adanya informasi tentang indikator kinerja berikut target yang akan dicapai dari suatu kegiatan atau program dengan dana yang disediakan dalam anggaran.



Gambar 2.1. Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Sumber: DEPKEU, 2007

Pada Pemerintah Pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya DIPA. Dalam rangka menjaga agar anggaran dapat dimulai segera pada awal tahun anggaran maka DIPA harus diselesaikan dalam bulan Desember tahun sebelumnya. Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Setelah masa transisi pada TA 2005, maka mulai TA 2006, DIPA telah dapat serentak dibagikan pada awal tahun anggaran dimulai, tepatnya tanggal 2 Januari tahun bersangkutan. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah pun digunakan mekanisme yang sama dengan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah.

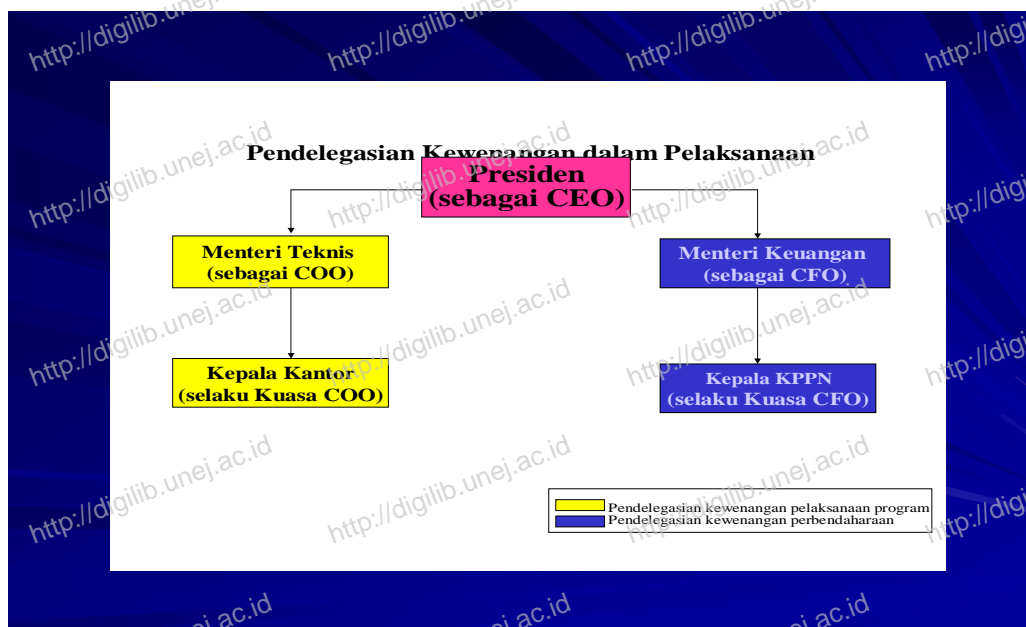
Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan maka rencana penerimaan kas juga dilampirkan. DPA disampaikan kepada kepala SKPKD untuk dimintakan pengesahan.

Jika DIPA bagi kementerian/lembaga sudah dapat dijadikan dokumen untuk segera melaksanakan anggaran Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD merupakan suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. SPD ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan telah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2.2.5. Pembagian Kewenangan

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Sedangkan kewenangan untuk pengelolaan keuangan didelegasikan kepada

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pembagian kewenangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Pendelegasian Kewenangan dan Pelaksanaan
Sumber: DEPKEU, 2007

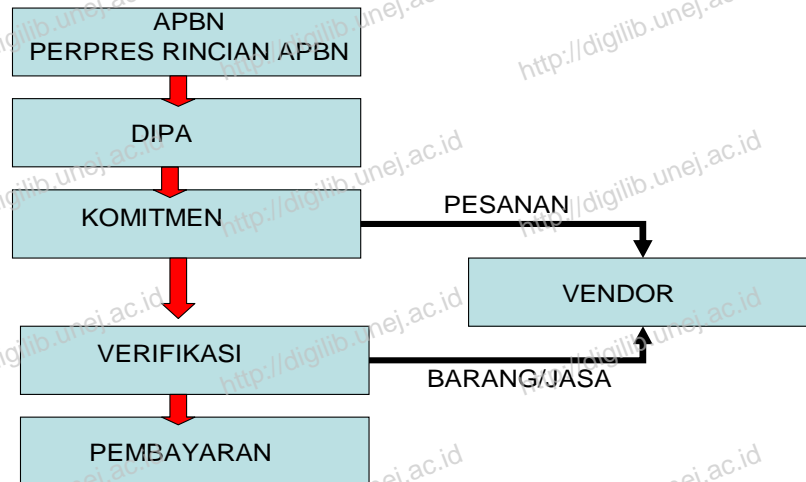
Menteri teknis/pimpinan lembaga merupakan *chief of operational officer* sedangkan Menteri Keuangan merupakan *chief of financial officer*. Dalam pelaksanaan anggaran, mereka mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rangka menjaga terlaksananya mekanisme *check and balance*. Kuasa Pengguna Anggaran dapat ditunjuk sehubungan dengan kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang luas, jumlah anggaran yang besar, atau karena lokasi kegiatan. Demikian pula di pemerintah daerah, dapat ditetapkan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran dan ditetapkan oleh kepala daerah karena alasan yang sama.

2.2.6. Sistem Penerimaan dan Pembayaran

Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (Azas Bruto). Pendapatan diakui setelah uang disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Belanja membebani anggaran daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Pada dasarnya alokasi anggaran kepada satuan kerja (DIPA) akan diberikan jika sudah tersedia alokasinya dalam APBN. Berdasarkan DIPA satuan kerja dapat melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Barang/jasa yang diperoleh harus diverifikasi kebenarannya. Setelah diverifikasi barulah dilakukan pembayaran. Urut-urutan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3.

PELAKSANAAN ANGGARAN



Gambar 2.3. Pelaksanaan Anggaran

Sumber: DEPKEU, 2007

Dalam pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk membebani anggaran. Sebagai konsekuensinya pengguna anggaran dituntut untuk melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil maupun materiil atas pelaksanaan anggaran serta mempertanggungjawabkannya. Apabila verifikasi terhadap belanja telah dilakukan dan sah maka pengguna anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar ke KPPN. Berhubung mereka harus mempertanggungjawabkannya maka bukti-bukti pengeluaran tetap disimpan di kementerian/lembaga dan tidak dikirim ke KPPN. KPPN tetap melakukan pengujian untuk mengecek ketepatan jumlah, peruntukan, maupun penerimanya. Mekanisme pembayaran ini dapat dilihat pada Gambar 2.4



Gambar 2.4. Mekanisme Pembayaran

Sumber: DEPKEU, 2007

Proses pengujian yang dilakukan pada pengguna anggaran dan pada Bendahara Umum Negara dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut:



Gambar 2.5. Pengujian Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Negara

Sumber: DEPKEU, 2007

2.2.7. Pejabat Perbendaharaan

Dalam hal pengelolaan keuangan pada satuan kerja (satker) terdapat pejabat perbendaharaan sebagai berikut: (Depkeu, 2007: 73)

1. Kuasa Pengguna Anggaran

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN di pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menunjuk pejabat kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja/satuan kerja sementara di lingkungan instansi pengguna anggaran bersangkutan dengan surat keputusan. Selanjutnya di pasal yang sama ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk :

- a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen;
- b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
- c. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Dalam hal satuan kerja sementara adalah dinas-dinas daerah, maka Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangan menunjuk pejabat kuasa PA, pejabat pembuat komitmen, pejabat penerbit

SPM dan Bendahara pengeluaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pembantuan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung-jawab kegiatan/pembuat komitmen.

3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk :

(1) Menguji,

(2) Membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan

(3) Memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

b. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

(1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih:

a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)

b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).

c. Jadwal waktu pembayaran.

d. Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

- (2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- (3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- (4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- (5) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.

4. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Bendahara Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga Menteri/ pimpinan lembaga gubernur/ bupati/ walikota untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

2.2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian empiris yang berkaitan dengan rendahnya penyerapan dana APBN masih terbatas. Hal ini karena merupakan fenomena baru yang terjadi di Indonesia untuk tiga tahun terakhir (2005-2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Didyk Choiroel (2007) bertujuan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan dan DIPA Semester I tahun anggaran 2006 dan tahun 2007, yang pada dasarnya dipetakan dari hasil survey pada pertengahan tahun 2007. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran dapat dibedakan atas tiga hal: (1) pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran; (2) keterlambatan penunjukkan Pejabat Perbendaharaan dan; (3) DIPA yang tidak langsung digunakan.

Penelitian atau survey yang dilakukan Kanwil XXIX Ditjen Perbendaharaan Ambon (2007) tentang rendahnya realisasi DIPA Provinsi Maluku dan Upaya Percepatannya, hasil penelitiannya menunjukkan faktor yang

mempengaruhi rendahnya penyerapan dana dipengaruhi oleh: (1) Kurangnya pemahaman terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 (2) Kesiapan pengelola kegiatan (3) Revisi pencairan dana untuk kegiatan yang diblokir (4) Terlambatnya Proses Pelelangan (tender)

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian-penelitian tersebut mempunyai topik yang sama dengan perbedaan bobot/ macam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya tampak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya

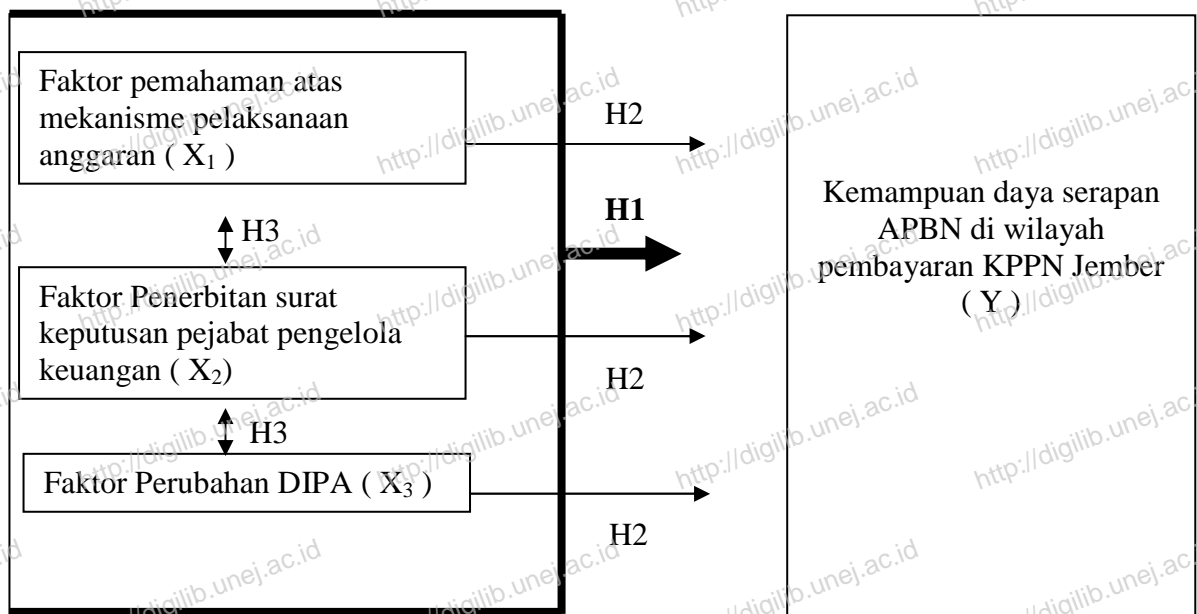
Keterangan	Didyk Choiroel	Kanwil XXIX Ditjen Perbendaharaan Ambon	Sekarang
Tahun	2007	2007	2008
Tujuan	Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan dan DIPA Semester I tahun anggaran 2006 dan tahun 2007, yang pada dasarnya dipetakan dari hasil survey pada pertengahan tahun 2007.	Mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi DIPA Provinsi Maluku dan upaya Percepatannya	a. Apakah secara simultan dan parsial faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember ? b. Berapa besar faktor pemahaman atas mekanisme

			<p>pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA mempengaruhi secara simultan dan parsial terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember ?</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil pemetaan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran dapat dibedakan atas tiga hal: (1) pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran; (2) keterlambatan penunjukkan Pejabat Perbendaharaan dan; (3) DIPA yang tidak langsung digunakan.</p>	<p>faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan dana dipengaruhi oleh: (1) kurangnya pemahaman terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, (2) kesiapan pengelola kegiatan, (3) revisi pencairan dana untuk kegiatan yang diblokir dan (4) terlambatnya proses pelelangan (tender)</p>	

Sumber: Data diolah

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini secara keseluruhan menggambarkan pengaruh secara simultan dan parsial antara faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel terukur, oleh karena itu pengukurannya melalui instrumen-instrumen penelitian (item-item) kuisisioner penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.6. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara faktor pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran, penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan dan perubahan DIPA terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.
3. Faktor Pemahaman atas mekanisme pelaksanaan berpengaruh dominan terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu wawasan yang mendalam mengenai obyek suatu penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas sebagai dasar untuk pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai *explanatory research* atau *confirmatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal dan menguji keterkaitan antara beberapa variabel melalui pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (Singarimbun dan Efendi, 1995: 256). Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember dengan pengambilan sampel pada para pengelola keuangan satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jember.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Santoso (2002: 49) populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu hal atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam satu riset tertentu. adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan (pejabat perbendaharaan) satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jember yang

berjumlah 320 orang. Adapun jumlah dan sebaran para pejabat pengelola keuangan di wilayah pembayaran KPPN Jember dapat terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Populasi Penelitian (Pejabat Pengelola Keuangan di Wilayah Pembayaran KPPN Jember)

Pejabat Pengelola Keuangan di Wilayah Pembayaran KPPN Jember	Jumlah (Orang)
Kuasa Pengguna Anggaran	80
Penguji dan Penandatanganan SPM	80
Pembuat Komitmen	80
Bendahara Pengeluaran	80
Jumlah	320

Sumber: KPPN Jember

3.2.2 Sampel

Menurut Nazir (1995: 58) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini di tentukan sejumlah 48 orang (15%) dari jumlah populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan prosedur *purposive sampling*, (sampel sengaja, sampling bertujuan, atau sampel ber kriteria). Apabila subjek populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua sedangkan bila subjek lebih dan 100 maka diambil 10% sampai 15% dari populasi. (Arikunto,1998:115)

Jumlah sampel dalam penelitian ini tampak pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sampel Penelitian dengan Menggunakan Teknik *Purposive Sampling*

Pejabat Pengelola Keuangan di Wilayah Pembayaran KPPN Jember	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (<i>Purposive Sampling</i>)/ Orang
Kuasa Pengguna Anggaran	80	$80 \times 15\% = 12$
Penguji dan Penandatanganan SPM	80	$80 \times 15\% = 12$
Pembuat Komitmen	80	$80 \times 15\% = 12$
Bendahara Pengeluaran	80	$80 \times 15\% = 12$
Jumlah	320	48

Sumber: Data diolah

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan pada responden yang dipilih, sumber data primer adalah objek penelitian yaitu responden. Daftar pertanyaan atau kuesioner tersebut diberikan kepada para pengelola keuangan di wilayah pembayaran KPPN Jember.

b. Data Sekunder

Data yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer, sumber data sekunder adalah sumber-sumber data seperti studi kepustakaan, artikel, internet, jurnal dan data dari perusahaan. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Peraturan-peraturan yang diterbitkan

Departemen Keuangan, KPPN Jember, dan jurnal serta penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Terhadap data primer, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para pejabat pengelolaan keuangan yaitu Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penguji dan Penandatanganan SPM, Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran yang dipandu dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Sementara untuk data sekunder dikumpulkan dari data yang dipublikasikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember yang telah tersedia.

3.5. Identifikasi Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka variabel yang akan dianalisis akan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X)

Yakni variabel yang terdiri pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3)

2. Variabel Terikat (Y)

Yakni variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah uraian yang membatasi setiap istilah atau frasa kunci yang digunakan dalam penelitian dengan makna tunggal dan terukur.

Definisi operasional ini memberikan gambaran variabel penelitian agar tidak menimbulkan salah interpretasi. Variabel-variabel tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X_1)

Pemahaman mekanisme pelaksanaan anggaran adalah kemampuan pejabat pengelola keuangan dalam memahami/ mengerti serangkaian prosedur mulai dari kegiatan pengadaan barang dan jasa sampai dengan proses permintaan pembayaran dan pengujian serta penerbitan perintah bayar.

2. Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan (X_2)

Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan adalah tanggal yang menunjukkan ditetapkannya para pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran

melalui Surat Keputusan. Surat Keputusan tersebut diterbitkan pada awal tahun anggaran yaitu pada bulan Januari.

3. Perubahan DIPA (X_3)

Perubahan DIPA adalah perubahan atau revisi atas dokumen anggaran satuan kerja yang diproses oleh Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan atau Direktorat Perbendaharaan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat digunakan secara sah per tanggal 1 januari tahun anggaran berjalan.

4. Kemampuan Daya Serapan APBN (Y)

Kondisi yang menunjukkan tingkat kemampuan penyerapan dana APBN oleh satuan kerja (satker) terhadap pagu dana yang tersedia dalam dokumen anggaran pada tahun anggaran berjalan. Kemampuan daya serapan rendah, apabila penyerapan dana atau realisasi anggaran pada semester pertama tahun anggaran berjalan tidak proposional dengan pagu yang tersedia atau realisasi anggaran pada semester pertama tidak mencapai 50% dari pagu yang tersedia.

3.7. Tehnik Pengukuran Data

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Skala Likert*.

Skala ini dimulai dengan pernyataan sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, dengan skor masing-masing adalah sebagai berikut:

SS (Sangat Setuju) = 5

S (Setuju) = 4

KS (Kurang Setuju) = 3

TS (Tidak Setuju) = 2

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

Untuk setiap indikator mulai dari pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) sampai dengan kemampuan daya serapan APBN (Y) diukur dengan *Skala Likert*, skor terendah bernilai 1 dan nilai tertinggi diberi skor 5.

3.8. Metode Analisis Data

3.8.1. Uji Validitas

Menurut Sarwono (2006:2 18) suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS. Menurut Sarwono (2006:226) ada beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis validitas antara lain: (1) menentukan hipotesis (skor butir berkorelasi atau tidak berkorelasi positif dengan skor faktor); (2) menentukan besarnya nilai r_{tabel} dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = jumlah kasus - 2 dan tingkat signifikansi sebesar 5%; (3) menghitung $r_{\text{kuesioner}}$ untuk setiap butir pertanyaan yang hasilnya dapat dilihat pada bagian *output corrected item total correlation* dan (4) item pertanyaan dikatakan valid apabila memiliki nilai *corrected item total correlation* yang lebih besar dari nilai r_{tabel} .

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sarwono (2006:219) reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas

berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan seberapa besar pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Pengujian reliabilitas dapat dengan menggunakan pendekatan statistik *Cronbach Alpha*. Karena jumlah butir pertanyaan untuk masing-masing variabel kurang dari sepuluh item, maka suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,20$ (Santoso, 2002:200).

3.8.3 *Method of Successive Interval*

Skala pengukuran yang dihasilkan dari *Skala Likert* adalah ordinal. Agar dengan data tersebut dapat dianalisis dengan teknik analisis statistik parametrik, skala ordinal tersebut ditransformasikan ke dalam skala interval dengan menggunakan metode yang dikembangkan Hays disebut *method of successive interval* dalam Sumarsono (2003). Rumusnya adalah:

$$MI = \frac{(DLL) - (DUL)}{(ABUL) - (ABLL)}$$

dimana: MI (*mean of interval*) = rata-rata interval. DLL (*density at lower limit*) = densitas batas bawah. DUL (*density at upper limit*) = densitas batas atas.

ABUL (*area below upper limit*) = daerah di bawah batas atas. ABLL (*area below lower limit*) = daerah di bawah batas bawah.

3.8.4 Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) dengan kemampuan daya serapan APBN (Y) digunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Kemampuan daya serapan APBN

X_1 = pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran

X_2 = penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan

X_3 = perubahan DIPA

b_0 = Konstanta, besarnya tidak dipengaruhi variabel bebas (X)

b_1 , b_2 dan b_3 : Koefisien regresi

3.8.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Supranto, 2001:257).

1) Menentukan kriteria pengujian hipotesis :

- a. $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$; maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_k) secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- b. $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k \neq 0$; maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_k) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

2) Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah $\alpha = 5\%$ atau interval keyakinan 95%

3) Menentukan nilai F dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{1 - R^2 / (n-k)}$$

Dimana :

F = pengujian secara serentak

R^2 = koefisien determinan

k = banyaknya variabel

n = banyaknya data.

4) Kriteria pengujian

1) H_0 diterima jika $F_h \leq F_{\alpha, df(k-1)(n-k)}$

2) H_0 ditolak jika $H_1 : F_h > F_{\alpha, df(k-1)(n-k)}$

b. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen yang lain konstan (Supranto, 2001:258).

1) Menentukan kriteria pengujian hipotesis.

a) $H_0 : b_1, b_2, \dots, b_k = 0$; maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh secara individu variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_k) terhadap variabel terikat (Y).

b) $H_0 : b_1, b_2, \dots, b_k \neq 0$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh secara individu variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_k) terhadap variabel terikat (Y).

2) Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$,

3) Menentukan nilai t hitung dengan rumus : (Supranto, 2001:205)

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

dimana :

b_i = koefisien regresi (b_1, b_2, \dots, b_k)

$Se(b_i)$ = standar error dari koefisien regresi

4) Kriteria pengujian

a) H_0 diterima apabila $H_0: t_{\alpha/2} \text{ df}(n-k) < t_h < t_{\alpha/2} \text{ df}(n-k)$

b) H_0 ditolak apabila $H_1: t_{\alpha/2} \text{ df}(n-k) > t_h > t_{\alpha/2} \text{ df}(n-k)$

3.8.6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat memenuhi standar sebagai *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE) maka model regresi perlu diuji dengan asumsi dasar klasik metode kuadrat terkecil (*Ordinary Last Square* atau OLS). Pengujian ini digunakan agar bebas dari gangguan multikolinieritas, heterkedastis, dan autokorelasi. Untuk memnuhi asumsi BLUE, maka peneliti menggunakan uji sebagai berikut:

a. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent*, maka dilakukan pengujian multikolinieritas ini. Apabila koefisien korelasi variabel yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independent*. Menurut Yarnest (2004:68) untuk mengukur ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dan nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan masing-masing variabel. Jika mlai $TOL < 0,10$ atau $TOL > 10$ dan nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas dan sebaliknya.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar *error term*. Autokorelasi terjadi kebanyakan pada serangkaian data runtut waktu. Maka intisari dan autokorelasi adalah bahwa *error term* pada satu periode waktu secara sistematis tergantung kepada *error term* pada periode-periode yang lain. Menurut Wijaya (2001: 80) untuk menguji apakah galat nilai-nilai pengamatan bersifat bebas (non-autokorelasi) dapat dilakukan melalui pengujian Durbin – Watson. Pengujian yang dipergunakan yaitu uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model, dimana nilai *Durbin Watson Test* dibandingkan dengan nilai *Durbin Watson Test* tabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini menyatakan bahwa apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varians satu residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Namun jika varians residual satu pengamatan lain berbeda, disebut heteroskedastisitas (Santoso, 2002:210). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya adalah dengan melakukan Uji Glesjer (*Glesjer Test*) atau Uji Park (*Park Test*). Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah Uji Glesjer. Menurut Gujarati (1997:187) pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas. Apabila hasil regresi absolut residual terhadap seluruh variabel bebas mempunyai nilai

t_{hitung} yang tidak signifikan maka dapat dikatakan bahwa model penelitian lolos dari adanya heteroskedastisitas.

3.8.7. Analisis Koefisien Determinasi Berganda

Analisis koefisien determinasi berganda adalah alat untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) secara bersama-sama terhadap variabel kemampuan daya serapan APBN (Y). Analisis koefisien determinasi berganda menggunakan notasi R^2 .

Bentuk umum dari koefisien determinasi berganda adalah:

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}$$

Dimana:

R^2 = Koefisien determinasi berganda

$b_1 \dots b_k$ = Koefisien Regresi

$x_1 \dots x_k$ = Variabel Bebas

y = Variabel terikat

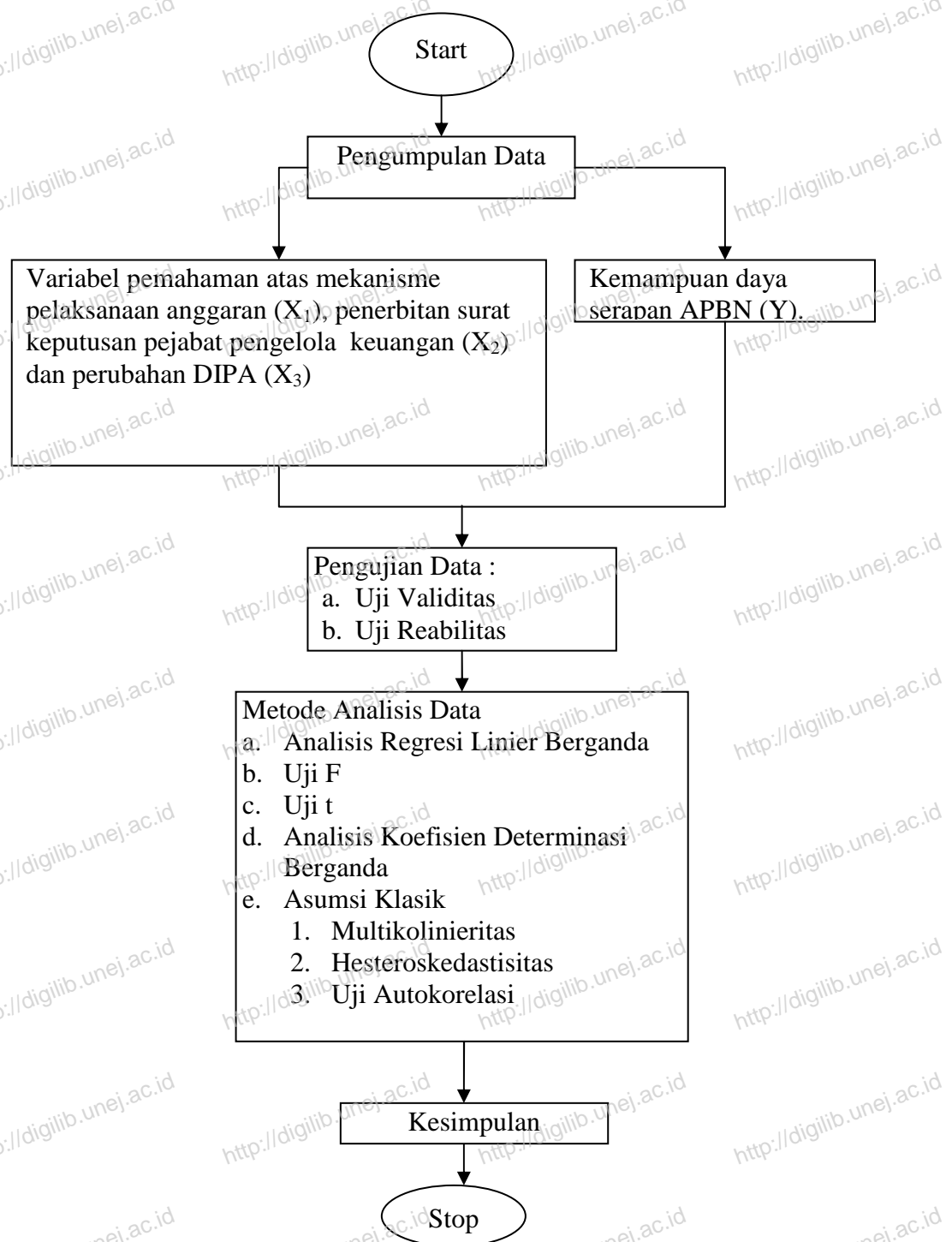
Formulasi hipotesis analisis koefisien determinasi berganda (R^2) adalah sebagai berikut:

1. Apabila R^2 mendekati 1 berarti variabel pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) secara keseluruhan kurang memberikan sumbangan terhadap kemampuan daya serapan APBN (Y).

2. Apabila R^2 sama dengan 1 berarti variabel pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) secara keseluruhan memberikan sumbangan terhadap kemampuan daya serapan APBN (Y).

3.9. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan:

- a. Persiapan penelitian
- b. Pengumpulan data-data melalui penyebaran kuisioner kepada Pejabat Pengelola Keuangan di Wilayah Pembayaran KPPN Jember
- c. Melakukan pengujian data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji tingkat keaslian dan keandalan data
- d. Data-data yang terkumpul dianalisis
 1. Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran (X_1), penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan (X_2) dan perubahan DIPA (X_3) terhadap kemampuan daya serapan APBN (Y).
 2. Dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi data.
 3. Dilakukan uji F. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh dari keseluruhan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
 4. Uji t. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
 5. Analisis Koefisien Determinasi Berganda digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

6. Dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi data.

e. Diambil keputusan setelah data-data selesai dianalisis (kesimpulan).

f. Penelitian berakhir

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Jabatan Pengelola Keuangan

Jabatan Pengelola Keuangan pada setiap Satuan Kerja/ Kerja terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Jumlah responden berdasarkan jabatan pengelola keuangan di wilayah pembayaran KPPN Jember dapat dikelompokkan kedalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah	
		Responden	%
1	Kuasa Pengguna Anggaran	12	25%
2	Pembuat Komitmen	12	25%
3	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	12	25%
4	Bendahara Pengeluaran	12	25%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah responden dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkatan jabatan. Hal tersebut meliputi responden yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 12 orang atau sebesar 25%.

Pembuat Komitmen sebanyak 12 orang atau sebesar 25%, Penguji Tagihan

dan Penandatanganan SPM sebanyak 12 orang atau sebesar 25%, dan Bendahara Pengeluaran sebanyak 12 orang atau sebesar 25%.

2. Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Jabatan Pengelola Keuangan
Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan saat ini di KPPN Jember tersaji pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Diklat yang Telah Diikuti

NO	Pekerjaan	Jumlah	
		Responden	%
1	Pernah	29	60,4%
2	Tidak Pernah	19	39,6%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah responden dapat diklasifikasikan menjadi dua kriteria berdasarkan diklat yang sesuai dengan jabatan saat ini. Dari 48 responden yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran di wilayah pembayaran KPPN Jember sebanyak 29 orang atau sebesar 60,4% pernah mengikuti diklat yang sesuai dengan jabatan yang saat ini sedang disandang. Sebanyak 19 orang atau sebesar 39,6%, tidak pernah mengikuti diklat yang sesuai dengan jabatannya.

3. Pendidikan terakhir.

Jumlah responden di wilayah pembayaran KPPN Jember berdasarkan kelompok pendidikan terakhir tersaji pada Tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan Terakhir

NO	Pendidikan	Jumlah	
		Responden	%
1	S3	2	4,17%
2	S2	9	18,75%
3	S1	20	41,66%
4	D3	3	6,25%
5	SLTA	14	29,17%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 jumlah responden dapat diklasifikasikan menjadi lima kriteria pendidikan terakhir. Hal tersebut meliputi responden dengan pendidikan terakhir Doktor (S3) sebanyak 2 orang atau 4,17%, S2 sebanyak 9 orang atau sebesar 18,75%, sarjana (S1) sebanyak 20 orang atau sebesar 41,66%, diploma (D3) sebanyak 3 orang atau sebesar 6,25% dan tingkat SLTA sebanyak 14 orang atau sebesar 29,17%.

4. Jenis Kewenangan

Jumlah responden berdasarkan jenis kewenangan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersaji pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Kewenangan

NO	Kewenangan	Jumlah	
		Responden	%
1	Kantor Pusat	8	16,66%
2	Kantor Daerah	29	60,42%
3	Dekonsentrasi	-	-
4	Tugas Pembantuan	11	22,92%
	Jumlah	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 jumlah responden dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis kewenangan dalam DIPA. Hal tersebut meliputi responden yang mempunyai jenis kewenangan dalam DIPA Kantor Pusat sebanyak 8 orang atau sebesar 16,66%, Kantor Daerah sebanyak 29 orang atau sebesar 60,42%, Dekonsentrasi tidak ada karena DIPA yang jenis kewenangnya Dekonsentrasi hanya ada pada wilayah propinsi, sedangkan responden yang mempunyai jenis kewenangan dalam DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 11 orang atau sebesar 22,92%.

4.1.2 Uji Validitas

Uji validitas ini akan mengukur sejauh mana suatu alat pengukur apa yang ingin diukur (Umar,2002:103), dan instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa saja yang seharusnya diukur (Sugiono,2004:109).

Berikut hasil dari perhitungan mengenai validitas yang dilakukan:

Tabel 4.5: Uji Validitas

Item/butir pertanyaan	Pearson Correlation	Signifikansi	Kesimpulan
Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1)			
X11	0.826**	0,000	VALID
X12	0.370**	0,010	VALID
X13	0.575**	0,000	VALID
X14	0.759**	0,000	VALID
Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2)			
X21	0.762**	0,000	VALID
X22	0.864**	0,000	VALID
X23	0.735**	0,000	VALID
X24	0.624**	0,000	VALID
Perubahan DIPA (X3)			
X31	0.322*	0,026	VALID
X32	0.762**	0,000	VALID
X33	0.792**	0,000	VALID
X34	0.783**	0,000	VALID
Kemampuan Daya Serapan APBN (Y)			
Y1	0.624**	0,000	VALID
Y2	0.725**	0,000	VALID
Y3	0.674**	0,000	VALID
Y4	0.750**	0,000	VALID

** Signifikansi pada level $\alpha = 1\%$

Sumber : Lampiran 1

Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua alat ukur yang digunakan adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi $< 0,05$. Sehingga dengan validitas data yang diperoleh, terjadi konsistensi internal dalam setiap item

pertanyaan. Berdasarkan hasil validitas tersebut maka data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama. Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.6 :

Tabel 4.6 : Uji Reliabilitas

NO	Variabel	Nilai α	α ketentuan	Kesimpulan
1	X1	0,5231	0,20	Reliabel
2	X2	0,7436	0,20	Reliabel
3	X3	0,6308	0,20	Reliabel
4	Y	0,6462	0,20	Reliabel

Sumber : Lampiran 2

Pengujian yang dilakukan adalah uji reliabilitas dengan menggunakan pendekatan statistik *Cronbach Alpha*. Karena jumlah butir pertanyaan untuk masing-masing variabel kurang dari sepuluh item, maka suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,20$ (Santoso, 2002:200). Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel. Hal ini dapat dilihat dari *standardized item alpha* masing-masing variabel yang lebih tinggi dari nilai kritis reliabilitas.

4.1.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel-variabel independen, yaitu Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3), terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN (Y). Pada penelitian ini,

dilakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS.

Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan		Koefisien regresi	Sig.
Variabel independen	Konstanta	5.788	0.020
	X1	0.306	0.010*
	X2	0.119	0.350 ^{TS}
	X3	0.230	0.165 ^{TS}
F _{hitung}		7.691	0.000**
R		0.587	
R ²		0.344	
α = 5 %			

Ket : ** signifikan pada alpha 1%

* signifikan pada α = 5%

^{TS} Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 3

Dari Tabel 4.7 maka dapat dibuat persamaan regresinya, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 5.788 + 0.306X_1 + 0.119X_2 + 0.230X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dilihat pengaruh dari variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3), terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN (Y). Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 5.788 dan positif dapat diartikan bahwa tingkat peningkatan Kemampuan Daya Serapan APBN (Y) apabila Pemahaman

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3).

2. Koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) sebesar 0.306 dan positif mempunyai arti bahwa apabila Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) tetap (konstan) maka setiap peningkatan variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) akan mempengaruhi peningkatan Kemampuan Daya Serapan APBN (Y).
3. Koefisien regresi untuk variabel Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) sebesar 0.119 dan positif mempunyai arti bahwa apabila Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) dan Perubahan DIPA (X3) tetap (konstan) maka setiap Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) akan mempengaruhi peningkatan Kemampuan Daya Serapan APBN (Y).
4. Koefisien regresi untuk variabel Perubahan DIPA (X3) sebesar 0.230 dan positif mempunyai arti bahwa apabila Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) dan Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) tetap (konstan) maka setiap Perubahan DIPA (X3) yang lebih baik akan mempengaruhi peningkatan Kemampuan Daya Serapan APBN (Y).

4.1.5. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F menunjukkan bahwa variabel dilihat pengaruh dari variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat

Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Kemampuan Daya Serapan APBN (Y).

Tabel 4.8 : Hasil Uji F

	Df	Mean Square	F	Signifikansi
Regresion	3	19,713	7,691	0,000**
Residual	44	2,563		
Total	47			

**Signifikan pada α 1%

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Kemampuan Daya Serapan APBN dengan nilai F hitung sebesar 7,691 dengan tingkat signifikansi dibawah 1%.

b. Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Kemampuan Daya Serapan APBN secara parsial

Tabel 4.9 : Hasil Uji-t

Model	Koefisien regresi	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikansi
Constant	5,788	2,407	2,009	0,000
X1	0,306	2,690	2,009	0,010**
X2	0,119	0,945	2,009	0,350 ^{TS}
X3	0,230	1,413	2,009	0,165 ^{TS}

** signifikan pada $\alpha = 1\%$

* signifikan pada $\alpha = 5\%$

^{TS} Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 3

Hasil perhitungan uji-t dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1)

Diketahui bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,690 > 2,009$ dan nilai probabilitas signifikansi diperoleh angka $0,010$ yang berada dibawah $\alpha = 5\%$ ($0,05$). Hal

ini berarti bahwa X1 berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN.

2. Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2)

Diketahui bahwa t hitung $<$ t tabel yaitu $0,945 < 2,009$ dan nilai probabilitas signifikansi diperoleh angka $0,350$ yang berada diatas $\alpha = 5\%$ ($0,05$). Hal ini

berarti bahwa X2 tidak berpengaruh secara nyata atau tidak signifikan terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN.

3. Perubahan DIPA (X3)

Diketahui bahwa t hitung $<$ t tabel sebesar $1,413 < 2,009$ dan nilai probabilitas signifikansi diperoleh angka $0,165$ yang berada diatas $\alpha = 5\%$ ($0,05$). Hal ini berarti bahwa X3 tidak berpengaruh secara nyata atau tidak

signifikan terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) berpengaruh sangat nyata terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN. Sedangkan Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN.

c. Faktor Dominan

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel.4.9, faktor Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) berpengaruh dominan terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN dengan koefisien regresi sebesar 0,306, dibandingkan faktor Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) sebesar 0,119 dan Perubahan DIPA (X3) sebesar 0,230.

4.1.6. Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Analisis koefisien determinasi berganda (R^2) digunakan untuk mengetahui besar proporsi atau sumbangan variabel independen yaitu Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3), terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN (Y). Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa *R square* (R^2) adalah sebesar 0,344. Hal ini mempunyai arti bahwa proporsi atau sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak sebesar 0,344 sedangkan sisanya sebesar 0,656 dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4.1.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan agar dapat mengetahui bahwa pemerkiraan koefisien regresi yang diperoleh dengan menggunakan metode kudrat terkecil seperti yg digunakan dalam analisa penelitian ini merupakan pemerkiraan koefisien regresi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) sehingga koefisien regresi tersebut adalah terbaik dan tidak bias (Supranto, 2004 : 10). Uji asumsi klasik meliputi :

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel bebas dan hubungan yang terjadi cukup besar. Uji ini untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi (hubungan) antar variabel tersebut.

Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF. Jika nilai VIF >10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika VIF < 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.10 : Hasil Uji Multikolinearitas

NO	VARIABEL	VIF	KESIMPULAN
1	X1	1.306	tidak terjadi multikolinearitas
2	X2	1.447	tidak terjadi multikolinearitas
3	X3	1.470	tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Lampiran 3

b. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara *disturbance term* suatu observasi (periode t) dengan observasi (periode t-1) lainnya yang disusun berdasarkan urutan waktu (times series). Deteksi terjadinya otokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin Watson Test*, dimana nilai *Durbin Watson Test* dibandingkan dengan nilai *Durbin Watson Test* tabel.

Menurut Wijaya (2001: 80) untuk menguji apakah galat nilai-nilai pengamatan bersifat bebas (non-autokorelasi) dapat dilakukan melalui pengujian Durbin –

Watson. Adapun prosedur pengujianya adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada autokorelasi

Hi : Ada Autokorelasi

Kaidah pengujian:

a. Terima Ho jika : $d_u < d < (4 - d_u)$

b. Terima Hi jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$

Dari Tabel Statistik Durbin – Watson untuk taraf nyata 5% pada $k = 3$ dengan

$n = 48$ diperoleh $d_L = 1,424$ dan $d_u = 1,674$. Sedangkan berdasarkan lampiran 3.

diketahui bahwa nilai $d_{hitung} = 2,046$. Dengan demikian nilai statistik d Durbin

Watson berada pada daerah penerimaan Ho. Berarti dapat disimpulkan bahwa galat nilai-nilai pengamatan bersifat bebas (tidak ada autokorelasi).

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian dilakukan dengan uji grafik Scatter Plot dan hasil pengujiannya

tidak terdapat pola yang jelas serta ada titik melebar diatas dan dibawah angka

nol pada sumbu Y. Berarti variabel dalam penelitian ini tidak terjadi

heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

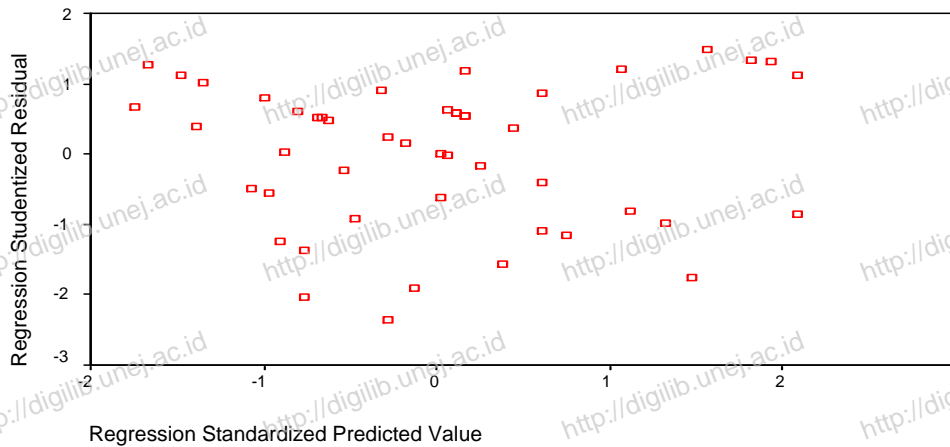
terjadi heterokedastisitas.

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Gambar 4.1: Uji Grafis Scotter Plot
Sumber : Lampiran 3

Pengujian heteroskedastisitas dapat pula diuji dengan menggunakan uji Gleijser yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan seluruh variabel bebas. Apabila hasil regresi tidak signifikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak melanggar asumsi heteroskedastisitas dengan kata lain model sudah dalam bentuk homoskedastisitas.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,736	3	,579	,859	,469 ^a
	Residual	29,624	44	,673		
	Total	31,360	47			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 4.2: Hasil Pengolahan Uji Gleijser
Sumber : Lampiran 3

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 0,859 dengan probabilitas signifikansi 0,469. Nilai tersebut sangat jauh di atas nilai toleransi yang ditetapkan yaitu α sebesar 5% (0,05). Berdasarkan perbandingan tersebut jelas bahwa dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember

Pada bagian ini akan dipaparkan implikasi dan interpretasi terhadap hasil analisa data telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) berpengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN. Sedangkan secara parsial variabel yang pengaruhnya menunjukkan signifikan hanya pada Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), variabel lainnya yaitu Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) pengaruhnya tidak menunjukkan signifikan tetapi mempunyai nilai yang positif.

Temuan penelitian ini (berdasarkan uji-F) mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Didyk Choirel (2007) dengan judul “Menganalisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemahaman mekanisme terhadap pelaksanaan anggaran,

keterlambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan/ pengelola keuangan negara, dan DIPA tidak dapat langsung digunakan sebagai penyebab terjadinya rendah penyerapan anggaran semester I Tahun 2007.

Berdasarkan hasil uji-F menunjukkan bahwa variabel secara bersama-sama Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN (Y), dengan nilai F hitung sebesar 7,691 pada tingkat signifikansi dibawah 1%. dan nilai koefisien determinasi berganda atau *R square* (R^2) adalah sebesar 0,344. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap perubahan kondisi variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) yang terjadi bersama-sama akan mempunyai dampak yang nyata atau berpengaruh secara signifikan terhadap setiap tingkatan kemampuan Daya Serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember. Perubahan kondisi terhadap variabel-variabel independen tersebut dapat terjadi apabila terdapat perubahan peraturan-peraturan yang terkait dengan perbendaharaan dan banyaknya kegiatan sosialisasi dan diklat tentang perbendaharaan sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember. Sedangkan nilai koefisien determinasi berganda atau *R square* (R^2) adalah sebesar 0,344 menunjukkan sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak sebesar 0,344 sedangkan sisanya sebesar 0,656 dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Hal ini menunjukkan adanya variabel lain selain variabel Pemahaman Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3), yang mempengaruhi Kemampuan Daya Serapan APBN (Y). Sebagai bahan pertimbangan variabel lain yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN adalah pernyataan Menteri Keuangan (Suara Karya, 26 Juni 2007) yang mengatakan dari 700 trilyun dana APBN yang disalurkan Depkeu, baru sekitar 20 persen yang digunakan. Banyak pejabat yang tidak berani menggunakan dana APBN maupun APBD sembarangan. Salah satunya khawatir akan dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel lain yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN yaitu variabel kepastian hukum bagi pengelola keuangan.

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.9 menghasilkan temuan bahwa Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN dengan koefisien regresi sebesar 0,306. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mekanisme pelaksanaan anggaran para pengelola keuangan mempunyai pengaruh dan peran penting sebesar 0,306 terhadap kondisi kemampuan daya serapan APBN. Semakin tinggi tingkat pemahaman mekanisme pelaksanaan anggaran para pengelola keuangan maka semakin tinggi kemampuan daya serapan APBN.

Mekanisme pelaksanaan anggaran dalam hal mekanisme pembayaran APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN dan diatur lebih teknis dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) No.PER-

66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Dalam Perdirjen tersebut memuat mulai dari prosedur pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai dengan prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam konsep anggaran berbasis kinerja mengamanatkan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Yang dimaksud dengan prestasi kerja adalah *output* atau *outcome* yang dihasilkan atau akan dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang terangkum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka mencapai anggaran berbasis kinerja dalam kaitannya pengelolaan keuangan negara maka setiap pengguna anggaran wajib menyusun rencana penarikan dana untuk setiap program/kegiatan yang ada dalam DIPA. Hal yang sama berlaku untuk penerimaan, yaitu rencana penerimaan pendapatan juga disiapkan jika pengguna anggaran tersebut mempunyai alokasi anggaran pendapatan.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu: (1) kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi; (2) fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus; (3) sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang); (3) penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas; (4) keinginan yang kuat untuk berhasil.

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada Tabel 4.9 menghasilkan temuan bahwa Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan tidak berpengaruh

secara signifikan dan bernilai positif terhadap Kemampuan daya serapan APBN dengan koefisien regresi sebesar 0,119. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan daya serapan APBN. Hal ini dimungkinkan tidak ada keterlambatan dalam hal Penerbitan SK Pengelola Keuangan pada Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Jember karena telah ditetapkan pada awal-awal tahun anggaran berjalan. Kondisi terlambat apabila penerbitan SK Pengelola keuangan ditetapkan setelah triwulan I tahun anggaran berjalan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN dan diatur lebih teknis dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, khususnya BAB II pasal 2 menyebutkan bahwa (1) pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk satker/ SKS di lingkungan Pengguna Anggaran bersangkutan dengan surat keputusan; (2) Menteri/ Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk Pejabat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Petandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran; (8) Tembusan Surat Keputusan para pejabat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. Berdasarkan Peraturan tersebut, jelas bahwa Penerbitan SK Pengelola keuangan harus dilaksanakan pada awal tahun berjalan dan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan anggaran khususnya pencairan dana di KPPN.

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada Tabel 4.9 menghasilkan temuan bahwa Perubahan DIPA tidak berpengaruh secara signifikan dan bernilai positif terhadap Kemampuan daya serapan APBN dengan koefisien regresi sebesar 0,230. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan DIPA tidak berpengaruh secara signifikan dan bernilai positif kondisi kemampuan daya serapan APBN. Berkaitan dengan tidak berpengaruhnya perubahan DIPA terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN mencerminkan kualitas DIPA yang diterima KPPN Jember sudah cukup baik dengan minimnya perubahan DIPA, sehingga Satker dengan mudah dan cepat melaksanakan pencairan dana di KPPN Jember. Semakin banyak perubahan suatu DIPA maka akan berpengaruh pada proses pencairan dana APBN yang mengarah pada tingkat kemampuan daya serapan APBN.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.102/PMK.06 /2006 tentang Tata Cara Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 memuat aturan apabila terjadi perubahan DIPA baik yang bersifat ralat maupun revisi, proses perubahan DIPA tersebut atas usulan satker yang disampaikan ke Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan Surabaya atau ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta. Waktu penyelesaian proses perubahan DIPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengesahan perubahan/ revisi serta data pendukung diterima lengkap.

4.2.2. Faktor dominan yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember

Berdasarkan hasil uji-t, faktor yang dominan berpengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember adalah variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) dengan nilai koefisien regresi 0,306, dibanding variabel lainnya Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan sebesar 0,119 dan Perubahan DIPA (X3) sebesar 0,230 yang tidak signifikan atau tidak pengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.

Faktor Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) banyak ditentukan kondisi pemahaman para pejabat pengelola keuangan di satuan-satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jember terhadap mekanisme pelaksanaan anggaran dan dukungan peraturan-peraturan perbendaharaan. Faktor ini secara dominan paling berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan daya serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember dibanding variabel independen lainnya, hal ini karena para pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penguji dan penandatanganan SPM, Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran sewaktu-waktu atau minimal satu tahun tidak lagi pada jabatan tersebut sehingga pemahaman atas mekanisme pelaksanaan anggaran yang baik tidak dapat dicapai secara optimal.

Faktor lainnya yaitu Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X1) dan Perubahan DIPA (X2) tidak cukup dominan dan tidak signifikan secara nyata. Hasil ini sangat beralasan karena kondisi Penerbitan SK Pejabat Pengelola

Keuangan dan Perubahan DIPA di wilayah pembayaran KPPN Jember cukup baik dengan dibuktikan adanya peringkat secara nasional, Kanwil XV Ditjen Perbendaharaan Surabaya yang merupakan kantor vertikal KPPN Jember mendapatkan peringkat I dalam hal penyelesaian DIPA dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas DIPA dan LKPP baik dari segi waktu penyelesaian DIPA dan LKPP maupun dari segi keakurat data sudah cukup baik.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil perhitungan uji F menunjukkan bahwa Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1), Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2), Perubahan DIPA (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Kemampuan Daya Serapan APBN dengan nilai F hitung sebesar 7,691 dengan tingkat signifikansi dibawah 1%.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan uji-t, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) berpengaruh sangat nyata terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN. Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan (X2) dan Perubahan DIPA (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN.
- c. Faktor yang dominan berpengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember adalah variabel Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X1) dengan nilai koefisien regresi 0,306, dibanding varibel lainnya Penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan sebesar 0,119 dan Perubahan DIPA (X3) sebesar 0,230 yang tidak signifikan atau tidak pengaruh terhadap Kemampuan Daya Serapan APBN di wilayah pembayaran KPPN Jember.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan daya serapan APBN perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran dan mekanisme perubahan DIPA oleh Departemen Keuangan serta peningkatan pemahaman kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tentang peran satker dalam efektifitas manajemen pengeluaran pemerintah melalui berbagai kegiatan diklat dan sosialisasi.
- b. Merumuskan pola dan mekanisme evaluasi dan fasilitasi yang intensif dan efektif dalam rangka mengkaji berbagai hambatan dan merumuskan alternatif pemecahan terhadap kemampuan daya serapan APBN baik di tingkat daerah maupun pusat.
- c. Dengan dasar hasil penelitian ini diharapkan perlunya peningkatan peran pembinaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember terhadap satuan kerja- satuan kerja di wilayah pembayarannya terkait dengan pelayanan dan peraturan-peraturan perbendaharaan.
- d. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daya serapan APBN selain faktor-faktor yang telah diuji/ dianalisis dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Renika Cipta , Jakarta

Choiroef, Didyk, Edisi 4, 2007, *Menganalisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2007* dalam Treasury Indonesia Media Keuangan Sektor Publik, Jakarta.

Departemen Keuangan RI, 2007, *Modul Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.

Departemen Keuangan RI, 2007, *Modul Perencanaan dan Penganggaran*, Jakarta.

Departemen Keuangan RI, 2007, *Modul Pelaksanaan Anggaran*, Jakarta.

Departemen Keuangan RI, 2007, *Modul Overviu Keuangan Negara*, Jakarta.

Gujarati . 1997, *Ekonomika Dasar* edisi ke dua, Erlangga, Jakarta.

Hadi, Sutrisno, *Bimbingan Menulis Skripsi-Tesis*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta

Kanwil XXIX Ditjen Perbendaharaan Ambon, Edisi 3, 2007, *Rendahnya Realisasi DIPA Provinsi Maluku dan Upaya Percepatannya* dalam Treasury Indonesia Media Keuangan Sektor Publik, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Nazir, M. 1995. *Metode Penelitian* cetakan ke empat, Ghalia Indonesia , Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) No.PER-66/PB/2005, *Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN*, Departemen Keuangan, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 134/PMK.06/2005, *Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN*, Departemen Keuangan, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.102/PMK.06 /2006, *Tata Cara Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007*, Departemen Keuangan, Jakarta

Santoso, Singgih. 2002, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.*, cetakan ke satu, PT.Elek Media Computindo, Jakarta

Sarwono, Jonathan, 2006, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13.00*, Andi Offset, Yogyakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Erlangga

Sugiono, 1994. *Metode Penelitian Administrasi*, Alpha Beta, Bandung

Sumarsono, 2003. *Metode Penelitian Bisnis*, Alpha Beta, Bandung

Supranto. J. 2001, *Statistik, Teori dan Aplikasi*, Edisi kelima jilid II Erlangga Jakarta

Umar, Husein, 2002, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Utama, Jakarta

Wijaya, 2001, *Analisis Statistik Dengan Program SPSS*, Alfabeta, Bandung

Yarnest. 2004, *Panduan Aplikasi Statistik*, Donna, Malang

Lampiran 1 : Surat Penyampaian Daftar Pertanyaan

Kepada Yth.: 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran
2. Para Pembuat Komitmen
3. Para Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4. Para Bendahara Pengeluaran
Di Wilayah Pembayaran KPPN Jember

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Jember yang bertugas di KPPN Jember, berencana mengadakan penelitian tesis tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Daya Serapan APBN di Wilayah Pembayaran KPPN Jember. Dengan segenap kerendahan hati, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya

Informasi yang Bapak/ Ibu berikan hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan penelitian ini saja. Saya menjamin kerahasiaan identitas Bapak/ Ibu dalam memberikan jawaban/ kebenaran data atas daftar pertanyaan/ pernyataan yang saya sampaikan .

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Mohamad Mas'ud

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. No.Responden :
2. Jabatan :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Pembuat Komitmen
 3. Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
 4. Bendahara Pengeluaran
 (*lingkari sesuai dengan jabatan saudara*)
3. Diklat terkait Jabatan : Pernah/ Belum Pernah *)
4. Pendidikan Terakhir : SMA/ D3/ S1/ S2/ S3 *)
5. Kewenangan :
 1. Kantor Pusat (KP)
 2. Kantor Daerah (KD)
 3. Dekonsentrasi (DK)
 4. Tugas Pembantuan (TP)
 (*lingkari sesuai dengan satker saudara*)

Keterangan:

*) *Coret yang tidak perlu*

B. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERTANYAAN

Dalam rangka mengisi kuesioner yang tersedia, Bapak/ Ibu hanya memilih satu dari beberapa alternatif jawaban dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling benar, dengan makna setiap alternatif jawaban sebagai berikut:

- SS (Sangat Setuju)
- S (Setuju)
- KS (Kurang Setuju)
- TS (Tidak Setuju)
- STS (Sangat Tidak Setuju)

Apabila terdapat kesalahan jawaban dan berniat untuk mengubah jawaban tersebut maka berilah tanda (=) diatas tanda (X) yang sebelumnya dipilih, dan berilah tanda (X) kembali pada jawaban yang dianggap paling benar

C. PENGUKURAN VARIABEL

I. Pemahaman Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (X_1)

1. Aturan-aturan tentang proses pencairan dana APBN yang termaktub dalam Peraturan Dirjen No. 66/PB/2005 dapat dipahami dengan baik.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Satker dapat melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai Keppres 61 tahun 2004 sebagai perubahan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Dalam proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) memerlukan waktu yang relatif lama.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Masih terdapat multitafsir terhadap ketentuan pembayaran dan pencairan dana APBN sehingga penyelesaian tagihan kepada negara tidak dapat dilakukan dengan cepat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

II. Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan (X_2)

1. Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan seharusnya sudah diterbitkan pada awal tahun anggaran.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Dikatakan terlambat dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan apabila diterbitkan setelah bulan ketiga tahun anggaran berjalan.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Keterlambatan Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran berikutnya.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Keterlambatan Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan disebabkan semata-mata masalah teknis administratif .
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

III. Perubahan DIPA (X_3)

1. Penyerahan DIPA kepada satker telah dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

2. DIPA yang diterima satker belum sepenuhnya dapat digunakan sehingga diperlukan proses perubahan DIPA.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Terjadinya perubahan/revisa DIPA disebabkan adanya kesalahan posting pada saat penyusunan anggaran dan diperlukannya penyesuaian pada saat pelaksanaan anggaran.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Proses perubahan/ revisi DIPA memerlukan waktu relatif lama.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

IV. Kemampuan Daya Serapan APBN (Y)

1. Realisasi anggaran satker dapat menunjukkan tingkat kemampuan daya serapan APBN.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Apabila realisasi anggaran satker sampai dengan semester I tahun anggaran berjalan masih dibawah 50% dari pagu yang tersedia menunjukkan tingkat kemampuan daya serapan APBN relatif rendah.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Rendahnya kemampuan daya serapan APBN pada semester I dapat mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan satker rendah.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Rendahnya kemampuan daya serapan APBN pada semester I memberikan dampak yang kurang baik terhadap roda kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

Lampiran 3: Data Hasil Kuisiner (Data Lapangan)

Lampiran 4 : Data Hasil Olahan MSI

Data Hasil Olahan MSI

Lampiran 5: Uji Validitas

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y
Y1	Pearson Correlation	1,000	,177	,146	,209	,624**
	Sig. (2-tailed)	,	,228	,321	,154	,000
	N	48	48	48	48	48
Y2	Pearson Correlation	,177	1,000	,411**	,507**	,725**
	Sig. (2-tailed)	,228	,	,004	,000	,000
	N	48	48	48	48	48
Y3	Pearson Correlation	,146	,411**	1,000	,430**	,674**
	Sig. (2-tailed)	,321	,004	,	,002	,000
	N	48	48	48	48	48
Y4	Pearson Correlation	,209	,507**	,430**	1,000	,750**
	Sig. (2-tailed)	,154	,000	,002	,	,000
	N	48	48	48	48	48
Y	Pearson Correlation	,624**	,725**	,674**	,750**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,
	N	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X11	X12	X13	X14	X1
X11	Pearson Correlation	1,000	,350*	,163	,562**	,826**
	Sig. (2-tailed)	,	,015	,269	,000	,000
	N	48	48	48	48	48
X12	Pearson Correlation	,350*	1,000	-,138	,098	,370**
	Sig. (2-tailed)	,015	,	,350	,507	,010
	N	48	48	48	48	48
X13	Pearson Correlation	,163	-,138	1,000	,257	,575**
	Sig. (2-tailed)	,269	,350	,	,077	,000
	N	48	48	48	48	48
X14	Pearson Correlation	,562**	,098	,257	1,000	,759**
	Sig. (2-tailed)	,000	,507	,077	,	,000
	N	48	48	48	48	48
X1	Pearson Correlation	,826**	,370**	,575**	,759**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,010	,000	,000	,
	N	48	48	48	48	48

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		X21	X22	X23	X24	X2
X21	Pearson Correlation	1,000	,536**	,286*	,311*	,762**
	Sig. (2-tailed)		,000	,049	,032	,000
	N	48	48	48	48	48
X22	Pearson Correlation	,536**	1,000	,575**	,396**	,864**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,005	,000
	N	48	48	48	48	48
X23	Pearson Correlation	,286*	,575**	1,000	,419**	,735**
	Sig. (2-tailed)	,049	,000		,003	,000
	N	48	48	48	48	48
X24	Pearson Correlation	,311*	,396**	,419**	1,000	,624**
	Sig. (2-tailed)	,032	,005	,003		,000
	N	48	48	48	48	48
X2	Pearson Correlation	,762**	,864**	,735**	,624**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	48	48	48	48	48

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		X31	X32	X33	X34	X3
X31	Pearson Correlation	1,000	,118	,037	,146	,322*
	Sig. (2-tailed)		,424	,801	,322	,026
	N	48	48	48	48	48
X32	Pearson Correlation	,118	1,000	,507**	,387**	,762**
	Sig. (2-tailed)	,424		,000	,007	,000
	N	48	48	48	48	48
X33	Pearson Correlation	,037	,507**	1,000	,600**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,801	,000		,000	,000
	N	48	48	48	48	48
X34	Pearson Correlation	,146	,387**	,600**	1,000	,783**
	Sig. (2-tailed)	,322	,007	,000		,000
	N	48	48	48	48	48
X3	Pearson Correlation	,322*	,762**	,792**	,783**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,026	,000	,000	,000	
	N	48	48	48	48	48

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6: Uji Reliabilitas

Reliability

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A I P
H A)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	Y1	3,8542	,8503	48,0
2.	Y2	4,0833	,6469	48,0
3.	Y3	4,0833	,6131	48,0
4.	Y4	3,9375	,6654	48,0

Correlation Matrix

	Y1	Y2	Y3	Y4
Y1	1,0000			
Y2	,1773	1,0000		
Y3	,1463	,4113	1,0000	
Y4	,2092	,5066	,4302	1,0000

N of Cases = 48,0

Statistics for Scale	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
	15,9583	3,6578	1,9125	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
Y1	12,1042 ,7105	2,3506	,2241	,0525
Y2	11,8750 ,4866	2,2819	,4899	,3061
Y3	11,8750 ,5309	2,4521	,4322	,2369
Y4	12,0208 ,4613	2,1910	,5198	,3263

Reliability Coefficients

Alpha = ,6188 Standardized item alpha = ,6462

Reliability

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

	Mean	Std Dev	Cases
1. X11	3,2083	1,1101	48,0
2. X12	4,4167	,5392	48,0
3. X13	2,7292	1,0260	48,0
4. X14	3,6458	,8377	48,0

Correlation Matrix

	X11	X12	X13	X14
X11	1,0000			
X12	,3495	1,0000		
X13	,1627	-,1378	1,0000	
X14	,5615	,0981	,2574	1,0000

N of Cases = 48,0

Statistics for Scale	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
	14,0000	5,4894	2,3429	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
X11	10,7917	2,4238	,5304	,4077
X12	9,5833	4,8440	,1494	,1675
X13	11,2708	3,7762	,1656	,1005
X14	10,3542	3,2123	,5246	,3487

Reliability Coefficients

Alpha = ,5373 Standardized item alpha = ,5231

Reliability

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P
H A)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	X21	4,0625	,8850	48,0
2.	X22	3,9375	,8606	48,0
3.	X23	4,2917	,6829	48,0
4.	X24	4,2500	,4838	48,0

Correlation Matrix

	X21	X22	X23	X24
X21	1,0000			
X22	,5360	1,0000		
X23	,2860	,5747	1,0000	
X24	,3106	,3960	,4186	1,0000

N of Cases = 48,0

Statistics for Scale	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
	16,5417	4,9344	2,2214	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
X21	12,4792	2,7230	,4890	,3019
X22	12,6042	2,3719	,6872	,4885
X23	12,2500	3,1702	,5337	,3764
X24	12,2917	3,8280	,4608	,2267

Reliability Coefficients 4 items

Alpha = ,7323 Standardized item alpha = ,7436

Reliability

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	X31	4,7500	,4376	48,0
2.	X32	4,2083	,6174	48,0
3.	X33	4,0417	,6510	48,0
4.	X34	4,1458	,5831	48,0

Correlation Matrix

	X31	X32	X33	X34
X31	1,0000			
X32	,1181	1,0000		
X33	,0373	,5073	1,0000	
X34	,1459	,3866	,6003	1,0000

N of Cases = 48,0

Statistics for Scale	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
	17,1458	2,6379	1,6241	4

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
X31	12,3958	2,2868	,1206	,0347
X32	12,9375	1,5066	,4948	,2750
X33	13,1042	1,3293	,5894	,4544
X34	13,0000	1,4894	,5681	,3822

Reliability Coefficients 4 items

Alpha = ,6578 Standardized item alpha = ,6308

Lampiran 7 : Hasil Regresi

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,587 ^a	,344	,299	1,6010	2,046

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59,139	3	19,713	7,691	,000 ^a
	Residual	112,778	44	2,563		
	Total	171,917	47			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,788	2,405		2,407	,020		
	X1	,306	,114	,375	2,690	,010	,766	1,306
	X2	,119	,126	,139	,945	,350	,691	1,447
	X3	,230	,163	,209	1,413	,165	,680	1,470

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3,971	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	1,561E-02	15,950	,08	,98	,05	,03
	3	8,990E-03	21,016	,31	,00	,87	,03
	4	4,772E-03	28,844	,61	,02	,08	,94

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

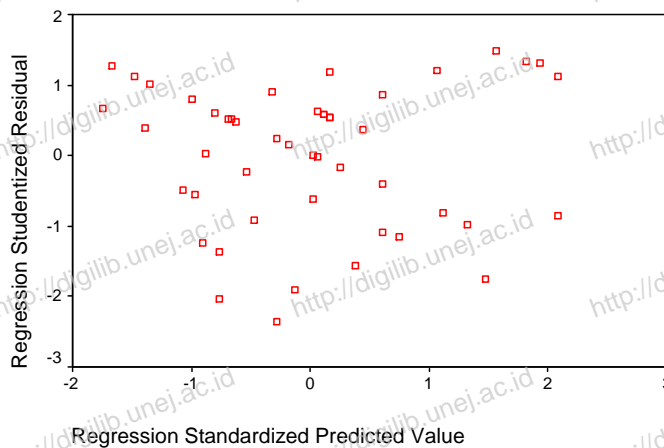
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	14,0024	18,2974	15,9583	1,1217	48
Std. Predicted Value	-1,744	2,085	,000	1,000	48
Standard Error of Predicted Value	,2377	,7203	,4458	,1232	48
Adjusted Predicted Value	13,8111	18,4671	15,9575	1,1438	48
Residual	-3,6400	2,2825	-1,30E-15	1,5490	48
Std. Residual	-2,274	1,426	,000	,968	48
Stud. Residual	-2,347	1,494	,000	1,017	48
Deleted Residual	-3,8782	2,5074	8,673E-04	1,7125	48
Stud. Deleted Residual	-2,480	1,516	-,007	1,033	48
Mahal. Distance	,057	8,533	2,938	2,132	48
Cook's Distance	,000	,153	,027	,036	48
Centered Leverage Value	,001	,182	,063	,045	48

a. Dependent Variable: Y

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Hasil Uji Glejser

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ABS_RES

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,235 ^a	,055	-,009	,8205	2,182

- a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: ABS_RES

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,736	3	,579	,859	,469 ^a
	Residual	29,624	44	,673		
	Total	31,360	47			

- a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: ABS_RES

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,236	1,232		-,191	,849		
	X1	2,705E-02	,058	,078	,463	,645	,766	1,306
	X2	7,125E-02	,065	,194	1,099	,278	,691	1,447
	X3	-1,11E-03	,084	-,002	-,013	,989	,680	1,470

- a. Dependent Variable: ABS_RES

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: ABS_RES

